

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BATAM

Liza Putri Andini¹, Lubna Salsabila²

¹Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam

email: pb181010017@upbatam.ac.id

ABSTRACT

Policy implementation refers to the stage after a policy is developed and must be implemented. The government and the community must work together to get the best results, namely in the process of transporting, sorting, and managing waste in the community. The purpose of this study is to identify each step in implementing the policy of Regional Regulation No. 11 of 2013 concerning waste management in Batam City, in order to reduce waste pollution. The researcher uses descriptive research method with a qualitative approach and qualitative analysis methods in his research. This research was conducted with the assistance of the Environment Agency, cleaning staff, and community members involved in the waste management process. The process of socialization and education related to good waste management through waste banks and non-governmental organizations that have not been maximized, the strength of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) is lacking, and public awareness of clean living is the reason it still exists. problem in this case. Researchers assess that the current government policy program has been running well, but is still not ideal, and needs to be evaluated periodically.

Keywords: *Implementation; Waste Management; Cleanliness.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-empat di dunia, pada tahun 2021, penduduk Indonesia tercatat sebanyak 272.229.372 juta jiwa (Zudan, 2021). Salah satu provinsi Kepulauan Riau dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kota Batam, dengan jumlah penduduk sebanyak 2.055.278 jiwa kemudian meningkat sebesar 22.098 jiwa dibandingkan tahun 2020. Kota Batam memiliki penduduk sebanyak 1169.649 jiwa (Infopublik, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Sisa padat

kegiatan manusia sehari-hari dan/atau proses alam disebut sampah. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan penanganan dan pengurangan sampah (Salsabila, 2020). Tugas dan wewenang Pemerintah Kota Batam dalam pengelolaan sampah pasal 6 Nomor 11 tahun 2013 menjelaskan bahwa tugas pemerintah Kota Batam melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah, upaya ini dilakukan karena masih ditemukan adanya masyarakat yang belum mendapatkan prasarana

dan sarana yang yang memadai dari Pemerintah Kota Batam. Contohnya dapat diambil dari Kecamatan Sagulung dan Batu Ampar Jodoh, masyarakat setempat menjelaskan bahwa dikecamatan tempat mereka tinggal kurangnya truk sampah yang mengakibatkan penumpukan sampah (Heryanto, 2021).

Penimbunan sampah seharusnya dapat dicegah jika ada kerja sama antar masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan sampah ini. Hal ini sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah tepatnya pada Pasal 3. Untuk menerapkan harus dimiliki oleh rasa kepedulian

masyarakat dan pemerintah dalam menangani sampah dilingkungan sekitar. Tentu saja ini menjadi motivasi masyarakat untuk menjadikan lingkungan yang asri. Tujuan program ini selain untuk menciptakan lingkungan yang bersih juga mengurangi angka pengangguran di kalangan masyarakat dengan berbisnis daur ulang sampah. Untuk melihat jumlah data sampah rumah tangga 2018-2020 dibawah ini:

Tabel 1.1 Data Jumlah Sampah Rumah Tangga 2018-2020

No	Tahun	Industri/Rumah Tangga	DLH	Lain	Jumlah
1	2018	37.992.370	234.959.330	-	272.951.700
2.	2019	46.898.970	247.368.120	-	294.267.090
3.	2020	42.553.250	244.834.150	1,786,630	289.174.030

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam (2020)

Pada data yang diatas menunjukkan bahwa sampah yang paling banyak diproduksi berasal dari rumah tangga dan industri. Contohnya sampah sisa makan. Sedangkan sampah yang diangkut oleh armada pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tidak seimbang dengan sampah yang diproduksi dari *industry*/rumah tangga. Sampah yang dimaksud dari sampah lain adalah sampah yang berasal dari hasil gotong royong, puing bangunan dan lainnya. Dari data tersebut peneliti dapat menilai bahwa sampah yang sering tertimbun merupakan sampah yang jangka waktunya cepat membusuk dan terurai

sehingga apabila dibiarkan dapat menimbulkan aroma tak sedap dan binatang yang mengurai sampah akan semakin bertambah banyak kecuali plastik. Sampah masih menjadi persoalan di Kota Batam. Tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di wilayah Sagulung, kerap penuh dengan tumpukan sampah tepatnya TPS Simpang Nato. Adanya tumpukan sampah mengganggu kenyamanan para pengendara yang melintas karena aroma bau yang menyengat. Dilansir dari Tribun

Batam, tumpukan sampah yang ada di kecamatan Sagulung terjadi karena lambatnya pergantian *bin* kontainer sampah. (TribunBatam, 2020). Berdasarkan paparan diatas maka dalam penelitian ini, peneliti merumuskan dua rumusan masalah yakni:

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Batam?
2. Apa faktor-faktor penghambat Implementasi Perda Nomor 11 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Batam?

KAJIAN TEORI

1. Kebijakan Publik dan Pembangunan Berkelanjutan

Pembuat kebijakan biasanya bekerja dalam kerangka konsep dan standar yang menetapkan tidak hanya tujuan kebijakan dan jenis instrumen yang dapat digunakan untuk mencapainya, tetapi juga sifat masalah yang dirancang untuk dipecahkan. Kerangka kerja ini, seperti Gestalt, tertanam dalam terminologi yang digunakan pembuat kebijakan untuk berbicara tentang pekerjaan mereka, dan itu berpengaruh justru karena begitu banyak yang diterima begitu saja dan tidak dapat diperiksa secara keseluruhan. Kerangka interpretif inilah yang akan saya sebut sebagai paradigma kebijakan. yang berhubungan dengan tugas pemerintah, seperti pertahanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain. Selain itu, dalam konteks negara yang demokratis, petugas pemerintah maupun pejabat-pejabatnya dipilih menurut prinsip-prinsip demokratis. Pada umumnya, kebijakan digunakan dalam menunjukkan suatu pilihan terpenting untuk mempererat kehidupan, baik privat maupun organisasi pemerintahan (Anggara, 2014).

2. Implementasi Kebijakan
Pendapat Lester dan Stewart (Christianingsih, 2020) mengatakan

bahwa 3 aktifitas utama yang terpenting dalam mencapai program implementasi kebijakan yaitu :

- a. Organisasi merupakan pembentukan atau penataan sumber daya, unit serta metode untuk menjadikan program berjalan.
- b. Interpretasi, dengan adanya interpretasi maka program menjadi suatu rencana dengan pengarahannya yang tepat serta dapat diterima dan dilaksanakan.
- c. Penerapan, merupakan suatu ketentuan yang telah ditetapkan dari pelayanan, mengenai pembayaran atau lainnya yang memiliki tujuan dengan program.

Menurut George C. Edward III berpendapat ada 4 indikator yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan (Djiwandono, 2017):

1. Faktor pertama yang mempengaruhi tercapai tidaknya tujuan implementasi kebijakan adalah komunikasi. George C. Edward III menyatakan bahwa komunikasi yang efektif juga mempengaruhi tercapai atau tidaknya tujuan implementasi kebijakan publik.
2. Sumber daya, merupakan variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumberdaya yang terdiri dari staf, wewenang, informasi, fasilitas.
3. Disposisi merupakan variabel ketiga, sebagai pelaksana kebijakan yang melakukan pendekatan terkait terlaksananya suatu kebijakan. Efektifitas suatu kebijakan akan terlaksana dengan baik, jika pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan serta harus memiliki kemampuan.
4. Struktur Birokrasi merupakan variabel keempat, yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan.

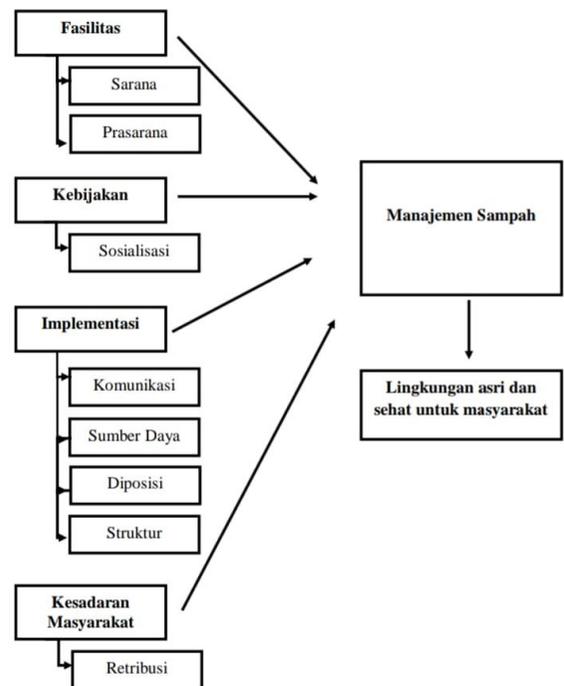
3. Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Implementasi
Menurut Edward III terdapat 3 faktor penghambat yang mempengaruhi

implementasi. *Pertama*, Sumber daya, Suatu organisasi, baik itu perusahaan maupun institusi, bahkan tidak lepas dari sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya. Kemajuan bisnis juga sangat ditentukan oleh SDM. *Kedua*, Sarana prasarana, Prasarana persampahan, disebut juga prasarana, merupakan bangunan dasar yang dapat mendukung instalasi operasional pengolahan sampah. Peralatan yang dapat digunakan dalam kegiatan pengolahan sampah disebut sebagai sarana fasilitas sampah. *Ketiga*, Kesadaran Masyarakat, Kesadaran masyarakat adalah pemahaman tentang apa yang telah atau harus dilakukan seseorang untuk membuat kehidupan sosial berfungsi sesuai dengan norma yang diterima untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik.

4. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Yayan (2019) yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Objek Wisata Pantai Batukaras Kabupaten Pangandaran. Temuan penelitian tersebut mengarah pada disahkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tentang Pengelolaan Sampah oleh Kabupaten Pangandaran pada tahun 2016. Kendalanya dapat dilihat dari Organisasi kurang baik dan belum maksimalnya ketersediaan perlengkapan/fasilitas pendukung. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Putri Irna Desih Sinaga (2017) yang berjudul Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Tampan). Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Pengelolaan sampah belum maksimal dilakukan, masyarakat masih membuang sampah diluar jam pembuang sampah. Masih kurangnya pemahaman tentang lingkungan yang bersih dan sehat. kurangnya sumber daya.

1. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif. Menurut Steven Dukeshire dan Jennifer Thurlow (dalam Sugiyono, 2017) Penelitian Kualitatif berhubungan dalam pemecahan suatu masalah dengan mendalami masalah tersebut terlebih dahulu serta melakukan observasi dan wawancara dilapangan, kemudian diuraikan dan dijelaskan permasalahan yang ditemukan dilapangan. Penelitian kualitatif juga merupakan proses aktivitas suatu kelompok maupun individu yang melakukan penilaian berkaitan dengan masalah kelompok maupun sosial. Proses yang dilakukan dalam penelitian ini melalui pembuatan pedoman wawancara kemudian, pengumpulan data para informan. Hal ini dilakukan agar data yang dibuat sudah sesuai dengan fakta yang ada dilapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan

Kota Batam, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dibentuk dari penggabungan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Kota Batam dan Pemerintah Kota Batam. Aparatur Daerah. Pelayanan Lantai dan Pembersihan (DKP). Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam merupakan OPD Tipe A yang terdiri dari empat divisi sebagai berikut:

1. Bidang Tata Lingkungan
2. Bidang Pengelolaan Persampahan
3. Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup
4. Bidang Pengawasan Dan Penindakan

Implementasi sangat penting dalam kebijakan karena tanpanya, semua program kebijakan akan gagal dan tidak efektif. Kota Batam memiliki nilai tambah sebagai akibat dari adanya industri serta pariwisata yang mendatangkan orang dari luar daerah yang bertujuan mencari nafkah dan sebagainya. Banyak masyarakat di Kota Batam yang terpengaruh dengan kondisi kebersihan kawasan tersebut, dan ini menjadi hal yang perlu diperhatikan agar pandangan lokal maupun internasional terhadap lingkungan, udara, dan kebersihan lainnya menjadi positif. Implementasi disebut juga sebagai kebijakan yang kritis, dikarenakan semua tindakan akan menjadi sia-sia dan berpotensi gagal jika tidak ada implementasi. Untuk itu, Kota Batam melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan kegiatan di 9 kecamatan untuk menjadikan Kota Batam kota yang bersih, asri, dan nyaman, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, terkait dengan hal ini, program kegiatan dan tahapan yang dibuat meskipun ditemukan kendala dalam pelaksanaannya. Adapun, kendala yang pertama berkaitan dengan bank sampah, yang setiap kelurahannya memiliki kegiatan bank sampah yang membutuhkan kerja sama dari pemerintah maupun masyarakat.

Kemudian kendala kedua, berkaitan dengan kebersihan lingkungan dan pengangkutan sampah. Hal ini, dikutip dari observasi dan wawancara

dilapangan yang menunjukkan adanya perubahan dan masyarakat diberbagai kecamatan yang terbantu dengan adanya pengangkutan sampah dan kebersihan lingkungan tersebut. Kendala yang ketiga, terkait dengan hak petugas kebersihan yang masih ketergantungan dengan biaya dari APBD. Namun, pemerintah telah memaksimalkan APBD yang direncanakan setiap tahun agar hak petugas kebersihan dapat terpenuhi secara memadai. Dalam keadaan demikian dapat dijadikan sebagai model bagaimana pelaksanaan Perda tersebut agar terlaksana dengan lebih baik lagi.

Dinas Lingkungan Hidup di bawah pimpinan seorang Kepala Dinas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan persampahan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tanggung jawab utama Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah mengarahkan, mengendalikan, merumuskan, membina, mendorong, mengkoordinasikan, dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi serta tugas pembantuan. di lingkungan daerah sesuai dengan kewenangannya. Menurut teori George C. Edwards (Leo, 2012:136-141), efektivitas dalam melaksanakan kebijakan publik bergantung pada empat faktor: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Menurut informasi yang penulis kumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Batam telah dilaksanakan, namun belum secara maksimal. Keempat variabel teori George C. Edward III (Leo, 2012:136-141) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi, atau kemampuan untuk berkomunikasi. Implementasi kebijakan yang berhasil memerlukan pemahaman pelaksana tentang tugas yang ada. Untuk mengurangi distorsi implementasi, maksud dan tujuan kebijakan harus

dikomunikasikan kepada publik, khalayak sasaran. Tujuan kebijakan dapat dipenuhi setelah informasi diberikan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, petugasnya, dan masyarakat menjalin komunikasi yang sangat baik.

Pemerintah tentunya telah memberikan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah maupun pengurangan sampah, kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar sadar dan peduli terhadap pentingnya kebersihan lingkungan. Tanggapan dari beberapa narasumber bahwa inisiatif kebijakan pemerintah terkait sosialisasi serta penurunan dan pemantauan kebersihan lingkungan ini sudah berjalan dengan baik namun mungkin bisa ditingkatkan. sehingga masyarakat umum dan petugas kebersihan lebih mengetahui tentang pengelolaan sampah dan lebih memahaminya. Ketika pelaksanaan sosialisasi lebih bersifat formalitas, terkait dengan berbagai kegiatan tetapi tidak secara eksplisit untuk sosialisasi masyarakat dan petugas kebersihan, banyak yang belum mengetahui Perda ini dapat dijadikan pelajaran. Namun, meskipun upaya sosialisasi dan implementasi bermanfaat, petugas kebersihan, khususnya penyapu jalan, tidak menerima bantuan sebagai alat pendukung untuk pekerjaan mereka dan harus mengandalkan inisiatif mereka sendiri. Pemerintah tentunya telah memberikan sosialisasi terkait pengelolaan sampah dan pengurangan sampah, serta tidak jenuh untuk mengingatkan masyarakat agar peduli terhadap lingkungan dan sadar akan pentingnya kebersihan. sosialisasi dilakukan yaitu melalui Kelurahan, RT dan RW, dan terakhir ke masyarakat itu sendiri.

2. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya merupakan aspek penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Kebijakan tidak dapat diimplementasikan dengan baik jika sumber daya tidak mencukupi. Sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan semuanya terbatas. Sumber daya

manusia Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam yang ada masih kurang, sumber daya keuangannya masih kurang, dan sumber daya peralatannya cukup.

Implementasi pengelolaan sampah sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan arahan dari pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Hal ini, dilihat dari pengangkutan sampah yang rutin dilakukan dengan jadwal yang telah ditetapkan, kemudian petugas kebersihan penyapu jalan setiap hari bertugas. Namun Masih banyak masyarakat kurang paham tentang kebersihan dan kesadaran masyarakat masih kurang. Padahal setiap tahunnya pengangkutan sampah ini tidak ada hari liburinya selalu berkerja. Selain itu, armada pengangkutan sampah sering terjadi kerusakan ketika melakukan pengangkutan sampah dikarenakan kapasitas muatannya berlebih oleh karena itu, pengangkutan sampah menjadi tertunda. Selain itu, adanya kendala internal seperti kesiapan anggota, tidak masuk kerja, atau untuk pengangkutan sampah itu ada satgas yang sakit, armada rusak, target tonase sampahnya tidak tercapai.

3. Disposisi

Disposisi adalah sifat dan watak yang dimiliki oleh pelaksana, seperti kemauan, dedikasi, dan sifat demokratis, serta kecenderungan dalam pelaksanaannya untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kebijakan tersebut guna mencapai tujuan yang diinginkan dari kebijakan tersebut. Sikap di sini mengacu pada kesadaran dan kemauan staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, dan implementasi kebijakan tersebut sejauh ini telah berjalan dengan sukses. Petugas pengelolaan sampah mempunyai kontrak pertahun dari kontrak 1 januari-31 desember itu disebut dengan satuan tugas kebersihan persampahan (Satgas), sebelum kontrak pegawai diperpanjang akan nada evaluasi agar pegawai bisa berkerja di tahun depan. Kemudian nilai satgas itu penilaian dilapangan disiplin atau tidak pegawai. Jika penilainya tidak baik/ tidak maksimal maka pegawai tidak

perpanjang untuk tahun berikutnya, tapi sebaliknya jika pegawai bekerja dengan baik maka kontraknya akan di perpanjang. Pengawasannya itu rutin setiap hari mulai dari hari senin-minggu.

Pengelolaan sampah rutin dilakukan pengawasan setiap hari. Hal ini dilakukan untuk melihat disiplin atau tidaknya petugas sampah, jika petugas sampah bekerja dengan baik maka kontrak akan diperpanjang begitu juga sebaliknya jika petugas bekerja malas-malasan maka kontrak tidak diperpanjang. Selain itu, masih ditemukannya masyarakat yang membuang sampah sembarangan padahal petugas kebersihan sudah melakukan sosialisasi sebelumnya. Dalam hal ini, terlihat petugas kebersihan saja yang peduli dengan kebersihan sedangkan masyarakat sendiri bersikap tidak peduli.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi, khususnya yang mengimplementasikan kebijakan, memiliki dampak yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu elemen struktural terpenting adalah tersedianya standar operasional prosedur (SOP). Tercapainya tujuan organisasi akan sangat dipengaruhi oleh penyusunan struktur birokrasi yang tepat sesuai dengan kompetensi personel. Saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam telah menyelesaikan dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan SOP yang berlaku, sehingga kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik.

Penegelolaan sampah sudah melakukan Koordinasi dengan petugas sampah setiap harinya dan dilakukan setiap minggu melalui selalu rapat. Kemudian strategi pelayanan persampahan Kota Batam Dinas Lingkungan Hidup dilakukan sesuai dengan jadwal pelayanan persampahan yang diberikan kepada masyarakat dalam waktu seminggu dua kali. Selain itu, pemerintah sudah melakukan pengawasan kepada petugas dengan memantau bagaimana kinerja petugas dilapangan mengenai bersih atau tidaknya sampah yang dibersihkan

petugas hal ini dilakukan untuk kemajuan dalam kebersihan di Kota Batam. Selain itu sudah disediakan bank-bank sampah sejak dari 2014 untuk pemilahan sampah yang masih bisa dipakai sedangkan Sampah yang tidak bisa dipakai dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

Menurut (Tahir Arifin, 2014) implementasi adalah pilihan kebijakan mendasar yang dapat berbentuk perintah, pilihan, undang-undang, atau keduanya. Seringkali, keputusan eksekutif atau yudisial yang signifikan akan mengidentifikasi masalah yang perlu dipecahkan. beragam metode untuk membuat dan mengelola prosedur saat ini, yang secara eksplisit menyatakan tujuan atau sasaran yang harus dipenuhi

Penelitian (Winarno, 2014) dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik menyatakan bahwa implementasi kebijakan ialah proses yang krusial atau sangat penting dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar dapat memiliki tujuan ataupun dampak yang dikehendaki.. Implementasi dicermati secara luas mempunyai maksud pelaksanaan Undang-Undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan dalam usaha untuk mencapai atau meraih tujuan dari kebijakan atau program.

a. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Batam

1. Sumber Daya

Faktor terpenting dalam pelaksanaan kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah adalah sumber daya; tanpa mereka, kebijakan tidak dapat berfungsi dengan benar, dan hasil dari tujuan kebijakan tersebut tidak optimal. Sumber daya manusia, sumber daya uang, dan sumber daya peralatan merupakan sumber daya yang harus dimiliki. Kesimpulan hasil wawancara bersama Kepala Bidang Pengolahan Sampah

bahwa sumber dayanya masih kurang, terutama petugas kebersihannya.

Pengangkutan sampah untuk posisi terkait dengan pengangkutan sampah itu sumber dayanya 400 orang, terdiri dari supir sampah, roli sampah, kernet, penjaga bin, checker, tenaga pengamanan/security, operator aplikasi, mekanik, untuk dari segi sarana dan prasarana kita personalkan untuk armada sendiri yang ada di kita itu ada 119 unit untuk pengangkutan sampah, itu terdiri dari untuk amr roll jumlahnya 38 unit, kemudian ada dump truk sekitar 58 unit, compactor ada 10 unit, mobil pick up 2 unit, becak motor ada 2 unit, ada bin container itu terminal pembuangan sampah atau Tps portable 165 unit. Dan kendalanya sih internal misalnya kedisiplinan anggota, tidak masuk kerja, atau untuk pengangkutan sampah itu ada satgas yang sakit, armada rusak, target tonase sampahnya tidak tercapai.

2. Sarana dan Prasarana

Sebagai salah satu cara untuk mendukung keberhasilan kebijakan yang sedang dilaksanakan, sarana dan prasarana memainkan peran yang sama pentingnya. Jika aspek sarana dan prasarana tidak mendukung suatu proses kebijakan, maka potensinya tidak akan optimal. Sementara di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, saat ini rencana implementasi komponen sarana dan prasarana sudah sesuai, namun sarana kebersihan dan pengangkutan sampah di perumahan perlu ditingkatkan lagi, karena pengangkutan dua kali seminggu masih kurang perlu adanya tambahan personil dalam pengangkutan sampah. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala bidang persampahan serta para informan dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana sudah memadai seperti sudah disediakan penampung limbah-limbah domestik di TPS (Tempat Pembuangan Sementara), sampah domestik itu berupa sampah rumah tangga dan fasilitas pengangkut sampah seperti lori. Untuk kendala seperti armada

yang sering rusak karena sudah dioperasikan selama lebih dari 5 tahun. Kemudian kurangnya baju untuk petugas kebersihan dikarenakan hanya satu baju saja yang di berikan sedangkan petugas kebersihan bekerja setiap hari.

3. Kesadaran Masyarakat

Hal ini berdampak besar pada kinerja dan implementasi karena jika orang keras kepala dan tidak peduli dengan lingkungannya, apa yang akan terjadi di masa depan? Tentunya kota Batam akan menjadi icon buruk yang dipenuhi sampah karena sumber sampahnya adalah manusia, sehingga pemerintah dan masyarakat harus bersinergi. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala bidang persampahan serta para informan dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat masih kurang padahal pihak dinas persampahan sudah bekerja dengan baik. Namun, hanya beberapa masyarakat yang berpartisipasi mengenai kebersihan sampah. Kemudian petugas juga selalu menghimbau terkait pembuangan sampah yang sembarangan oleh warga. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kasus demam berdarah karena lingkungan yang kotor seperti yang telah terjadi sebelumnya. Selain itu, pemerintah sudah memberikan nasehat dan edukasi kepada masyarakat agar harus peduli dengan kebersihan lingkungan.

SIMPULAN

Berikut kesimpulan yang dibentuk berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan:

1. Pengelolaan sampah memang penting dalam mewujudkan Batam menjadi kota yang bersih, namun bila dilaksanakan tanpa peran serta masyarakat, hal-hal seperti kebersihan lingkungan semakin tidak terkendali, membuat tugas pemerintah semakin berat, meski seringkali dibombardir dengan

- himbauan dan slogan-slogan yang bertujuan untuk mendapatkan perhatian publik. Meskipun Perda ini mengacu pada pengangkutan sampah organik sekali sehari dan sampah non-organik dua kali seminggu, saya menyadari akan sulit untuk dilaksanakan karena keterbatasan armada dan sumber daya, kemudian hak petugas kebersihan belum selesai diberikan terkendala anggaran dan lain-lain.
2. Untuk menghemat biaya, kegiatan pemerintah yang sering dilakukan seperti monitoring atau setiap hari melakukan pengawasan lapangan agar tidak ada keluhan mengenai sumber daya sehingga bisa berjalan dengan efektif. Pemerintah berupaya meminalisir upah beberapa hak petugas kebersihan agar anggaran yang dikeluarkan terpenuhi, sehingga kegiatan bank sampah bisa berjalan dengan maksimal.
 3. Mampu meningkatkan pendapatan mereka melalui penjualan hasil kerajinan, dengan tujuan mengurangi timbulan sampah dan menjaga kebersihan lingkungan.
 4. Minimnya sumber daya manusia (SDM), sumber daya anggaran, dan kesadaran masyarakat akibat meningkatnya volume sampah menjadi faktor penghambat keberhasilan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Batam.
- mencapai smart city di kabupaten kulon progo. *Salsabila*. https://www.researchgate.net/publication/342006488_Analisa_efektifitas_bank_sampah_sebagai_alternatif_pengelolaan_sampah_dalam_mencapai_smart_city_di_kabupaten_kulon_progo.
- Djiwandono, A. H. (2017). Implementasi Program Desa Pesisir Tangguh di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang. *Skripsi*, 22–29.
- Heryanto. (2021). *Pengangkutan Sampah di Kecamatan Sagulung Batam Belum Maksimal*. <https://kepri.harianhaluan.com/daerah/pr-131088518/pengangkutan-sampah-di-kecamatan-sagulung-batam-belum-maksimal>
- Zudan. (2021). *Distribusi Penduduk Indonesia Per Juni 2021: Jabar Terbanyak, Kaltara Paling Sedikit*.
- Pahnla, S., Siponen, M., Mahmood, A., Aalsalem, M. Y., Khan, W. Z., Gharibi, W., Khan, M. K., Arshad, Q., Al-Fadhli, M., Zaher, A., World Economic Forum, Khan, W. Z., Khan, K., Rashid, A., Danezis, G., Chivers, H., Lupu, E., Martin, A., Lewis, M., ... World Economic Forum. (2018). 濟無No Title No Title No Title. *2018 International Conference on Computing Sciences and Engineering, ICCSE 2018 - Proceedings*, 16(3), 1–6.
- (1987, dalam S. 2019). (2019). Tinjauan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan: Pengelolaan Sampah Kota Kendari. *Jurnal Sosial Politik*, 5. [file:///C:/Users/User/Downloads/9821-Article Text-29266-1-10-20200104 \(1\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/9821-Article%20Text-29266-1-10-20200104%20(1).pdf)
- Infopublik. (2021). *semester I 2021, jumlah penduduk kepri sebanyak 2.055.278 jiwa*. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/557166/semester-i-2021-jumlah-penduduk-kepri-sebanyak-2-055-278-jiwa>
- TribunBatam. (2020). *Sampah Masih Jadi Persoalan di Batam, Ini Kata Kabid DLH Soal Sampah*

DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Christianingsih, E. (2020). *KEPENDUDUKAN DI. 2.IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ADMINISTRASI*
- Winarno. (2014). *Kebijakan publik : teori, proses, dan studi kasus*.
- Salsabila. (2020). Analisa efektifitas bank sampah sebagai alternatif pengelolaan sampah dalam

Menumpuk di TPS.
<https://batam.tribunnews.com/2020/12/30/sampah-masih-jadi-persoalan-di-batam-ini-kata-kabid-dlh-soal-sampah-menumpuk-di-tps>